Jurnal Artefak
2355-5726 (Print)
2580-0027 (Online)
UNIVERSITAS GALUH
: http://dx.doi.org/10.25157/ja.v13i2.27332

KONSTRUKSI MEMORI INTELEKTUAL KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM ARSIP PEMIKIRAN TENTANG DEMOKRASI DAN MASYARAKAT SIPIL: ANALISIS NARATIF

Caraka Yoga Aprilya [1*], **Muhammad Fashihullisan** [2]
[1] Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Pacitan, Indonesia
[2] Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muria Kudus, Indonesia
Email Koresponden: carakayoga77@gmail.com [1*]

Article history: Submitted: 2026-10-21 | Accepted: 2026-10-21 | Published 2026-10-30

Abstrak

Artikel ini menelaah pembentukan memori intelektual KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam wacana masyarakat sipil di Indonesia, dengan menempatkannya sebagai ulama sekaligus negarawan. Fokus penelitian ialah memahami bagaimana pemikiran dan kiprah Gus Dur direkam serta ditampilkan melalui dokumen-dokumen pemikirannya. Penelitian menggunakan metode historis berbasis arsip dengan bahan berupa tulisan dan dokumen terpilih, kemudian membacanya melalui analisis naratif. Hasil analisis memperlihatkan bahwa teks-teks tersebut menghubungkan tradisi keulamaan dengan praktik politik modern. Gagasan mengenai masyarakat sipil menggarisbawahi pluralisme, sikap saling menghormati, dan keadilan sosial yang berpijak pada tradisi Islam Nusantara serta membuka ruang bagi keberagaman. Dengan demikian, cara memori intelektual Gus Dur dibentuk melalui arsip menjadi salah satu pintu masuk untuk menelaah perkembangan masyarakat sipil Indonesia.

Kata kunci: Gus Dur, memori intelektual, civil society, archival research, analisis naratif

Abstract

This article examines the construction of KH. Abdurrahman Wahid's (Gus Dur) intellectual memory within civil society discourse in Indonesia, positioning him as both an Islamic scholar (*ulama*) and a statesman. The focus of the study is to understand how Gus Dur's thoughts and actions were recorded and displayed through documents of his writings. The research employs an archival-based historical method using selected writings and documents, which are then examined through narrative analysis. The analysis reveals that these texts connect the traditions of Islamic scholarship with modern political practices. His ideas on civil society emphasize pluralism, mutual respect, and social justice, rooted in the traditions of Nusantara Islam while opening space for diversity. Thus, the way Gus Dur's intellectual memory was constructed through archives serves as an entry point for examining the development of Indonesian civil society.

Keywords: Gus Dur, intellectual memory, civil society, archival research, narrative analysis

PENDAHULUAN

Istilah civil society atau masyarakat sipil merujuk pada ranah sosial tempat warga membentuk perkumpulan, membangun solidaritas, dan menjalankan aksi kolektif dengan tingkat kemandirian tertentu dari negara. Di Indonesia, gagasan tersebut berkembang melalui proses tawar-menawar yang dipengaruhi relasi negara dan masyarakat, dinamika organisasi keagamaan, serta perubahan politik, bukan melalui penerapan konsep yang seragam. (Cohen & Arato, 1999) menjelaskan peran

Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4. 0 Internasional.

masyarakat sipil dalam menopang demokrasi. Sementara itu, (Hefner, 2000) memperlihatkan bahwa demokratisasi di Indonesia perlu dipahami dengan memperhatikan keterkaitan Islam, organisasi sosial, dan pengalaman sejarah lokal. Oleh sebab itu, masyarakat sipil Indonesia lebih produktif dianalisis sebagai praktik dan wacana yang dibentuk oleh konteks sejarah daripada diperlakukan sebagai konsep abstrak yang berlaku sama di setiap tempat.

Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, penting bagi pembahasan ini karena tulisan-tulisannya mengaitkan isu agama, demokrasi, identitas kebangsaan, dan hubungan warga dengan negara. Relevansinya tidak berhenti pada kedudukannya sebagai ulama dan presiden, tetapi juga tampak dalam argumentasinya mengenai kebebasan, hak kelompok minoritas, dan batas keterlibatan agama dalam politik. Meski demikian, pembacaan akademik perlu membedakan tiga hal: gagasan yang tercatat dalam tulisan Gus Dur, gambaran mengenai dirinya yang disusun oleh penulis lain, dan ingatan publik yang terbentuk setelah ia wafat. Ketiganya saling berkaitan, namun masing-masing menuntut sumber dan cara analisis yang berbeda.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyinggung aspek-aspek yang berkaitan dengan persoalan ini, meskipun titik tekan dan metodenya tidak sama. (Barton, 2002), misalnya, membahas perjalanan intelektual dan politik Gus Dur melalui kajian biografi yang mencakup kehidupan serta kepemimpinannya. Salim (2011) mengkaji persaingan representasi masyarakat sipil Muslim dengan membandingkan NU dan ICMI pada 1990–2001, sekaligus memperlihatkan beragam penafsiran tentang hubungan Islam, negara, dan masyarakat. Fokus (Setiawan, 2017) adalah teologi pluralisme Gus Dur, sedangkan (Syabibi et al., 2021) mengkaji dakwah kultural dan komunikasinya melalui pendekatan hermeneutik serta historis-sosiologis. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini. Namun, fokus utamanya bukan penelusuran perbandingan naratif atas tulisan Gus Dur dari periode ke periode, termasuk bagaimana proses pemilihan dan penerbitan ulang dokumen turut membentuk memori intelektualnya.

Tabel 1. Research gap artikel

Kajian terdahulu	Fokus dan pendekatan	Kontribusi	Ruang yang ditangani artikel ini
Barton (2002)	Biografi intelektual dan politik serta perjalanan kepemimpinan Gus Dur.	Mengaitkan gagasan Gus Dur dengan lintasan hidup dan peran kepemimpinannya.	Menganalisis bangunan narasi dalam sejumlah dokumen, bukan mengulang penulisan biografi.
Salim (2011)	Perdebatan representasi masyarakat sipil Muslim dalam hubungan NU dan ICMI sepanjang 1990–2001.	Memperlihatkan bahwa hubungan Islam, negara, dan masyarakat ditafsirkan secara beragam.	Menelaah perbedaan tekanan naratif di dalam tulisan Gus Dur sebagai sumber primer.

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Kajian terdahulu	Fokus dan pendekatan	Kontribusi	Ruang yang ditangani artikel ini
Setiawan (2017)	Gagasan teologis tentang pluralisme dalam pemikiran Gus Dur.	Menjelaskan landasan serta arti penting pluralisme bagi pemikiran Gus Dur.	Membaca pluralisme bersama isu demokrasi, solidaritas sosial, dan relasi agama–negara dalam dokumen lintas periode.
Syabibi et al. (2021)	Dakwah kultural dan komunikasi Gus Dur dengan pendekatan hermeneutik dan historis-sosiologis.	Menguraikan peran dialog, komunikasi, dan pengakuan atas pluralitas.	Memasukkan kritik sumber arsip serta menelaah seleksi dan publikasi ulang dokumen.

Artikel ini tidak berangkat dari anggapan bahwa memori intelektual Gus Dur sama sekali belum pernah diteliti. Persoalan yang lebih khusus ialah belum teruraikannya secara konsisten, pada kumpulan dokumen yang dikaji, keterkaitan antara isi sumber primer, situasi saat teks ditulis, pola narasi di dalamnya, dan penyajiannya kembali melalui arsip digital. Pembedaan ini diperlukan sebab keberadaan arsip tidak serta-merta sama dengan ingatan masyarakat. Dokumen menyimpan jejak tertulis, sedangkan kegiatan kurasi, penerbitan ulang, dan pembacaan pada masa berikutnya dapat memengaruhi aspek mana yang lebih menonjol dalam jejak tersebut (Olick & Robbins, 1998).

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian dirancang untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana tulisan Gus Dur yang tersimpan dalam arsip periode 1997–2006 menggambarkan keterkaitan demokrasi, agama, solidaritas sosial, dan masyarakat sipil? Kedua, unsur pemikiran apa yang tampak berlanjut atau mengalami pergeseran penekanan ketika dokumen-dokumen itu dibandingkan dengan mempertimbangkan konteks kemunculan dan pengarsipannya? Penelitian ini bertujuan menyusun interpretasi naratif yang berpijak pada bukti sumber, sekaligus memperjelas pengertian "memori intelektual" agar konsep tersebut tidak disamakan dengan keseluruhan ingatan publik tentang Gus Dur.

METODE PENELITIAN

Desain dan batas penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai kajian kualitatif-historis dengan memanfaatkan arsip dan menerapkan analisis naratif. Pilihan analisis dokumen sesuai dengan objek kajian, yaitu teks yang telah ditulis dan dipublikasikan, alih-alih tindakan sosial yang diamati secara langsung. Dalam pendekatan ini, dokumen dipahami bukan hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai hasil dari konteks tertentu, tujuan komunikasi, dan proses pemilihan (Bowen, 2009). Adapun analisis naratif dipakai untuk mengkaji cara gagasan dirangkai, diberi tekanan, dan dihubungkan sehingga membentuk argumentasi tentang agama, negara, dan masyarakat (Riessman, 2008).

Korpus penelitian dibatasi pada dokumen bertahun 1997–2006. Rentang tersebut ditentukan secara purposif agar tulisan yang berkaitan dengan penghujung Orde Baru dan awal Reformasi dapat dibandingkan dengan refleksi yang dibukukan pada 2006. Pada lima tulisan

yang ditemukan di GusDur.Net, informasi mengenai media dan tanggal penerbitan pertama dicatat apabila tersedia; keterangan ini dibedakan dari metadata "Arsip Tahun". Untuk tulisan tahun 2006, penelusuran dilakukan melalui edisi buku dan versi yang diterbitkan ulang oleh NU Online pada 2015. Dengan demikian, rentang waktu ini menunjuk pada sejumlah dokumen yang dapat dilacak dan diverifikasi, bukan pada rekonstruksi menyeluruh atas perkembangan pemikiran Gus Dur.

Korpus dan kriteria pemilihan sumber

Sumber primer penelitian mencakup enam teks karya Gus Dur yang berkaitan langsung dengan demokrasi, solidaritas sosial, hubungan agama dengan negara, atau keberagaman penafsiran. Lima teks ditelusuri dari laman karya tulis GusDur.Net, yang mengidentifikasi dirinya sebagai situs resmi Gus Dur, sedangkan satu teks lainnya berasal dari buku terbitan 2006 yang dimuat kembali oleh NU Online. Dokumen-dokumen itu dipilih karena teksnya dapat diakses dan argumennya memungkinkan perbandingan. Tulisan yang dibuat oleh penulis lain tentang Gus Dur tidak dimasukkan sebagai data primer. Karya sekunder tersebut digunakan untuk memetakan posisi penelitian terdahulu dan menjadi bahan pembanding ketika menilai kesesuaian atau perbedaan interpretasi penelitian ini.

Tabel 2 Matriks Inventarisasi Dokumen Primer Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Relevansi Analitisnya

No.	Dokumen primer dan tahun arsip/edisi	Jenis dan asal teks	Relevansi analitis
1	Wahid (1997a), "Demokrasi, Keadilan dan Keterwakilan"	Artikel/kolom; pertama terbit di Harian Media Indonesia, 25 April 1997; tersedia pada arsip GusDur.Net.	Menelaah dasar normatif demokrasi, penegakan hukum, musyawarah, dan keterwakilan warga.
2	Wahid (1997b), "Membentuk Solidaritas Sosial"	Artikel/kolom; pertama terbit di Harian Media Indonesia, 1 April 1997; tersedia pada arsip GusDur.Net.	Menggambarkan solidaritas sebagai fondasi bagi tatanan sosial yang memberi perlindungan.
3	Wahid (1998a), "Agama dan Demokratisasi"	Artikel/kolom; pertama terbit di Harian Duta Masyarakat, 21 Oktober 1998; tersedia pada arsip GusDur.Net.	Mengkaji relasi antaragama dan keterlibatan bersama dalam proses demokratisasi.
4	Wahid (1998b), "Hindari Negara Berasumsi Agama"	Artikel/kolom; pertama terbit di Harian Media Indonesia, 13 November 1998; tersedia pada arsip GusDur.Net.	Memuat kritik terhadap asumsi dan pembakuan hubungan antara agama dan negara.
5	Wahid (2003), "Demokrasi dan Demokratisasi Indonesia"	Artikel/kolom; pertama terbit di Harian Kedaulatan Rakyat, 12 November 2003; tersedia pada arsip GusDur.Net.	Menyoroti hak warga, jaminan bagi minoritas, serta perbedaan antara institusi dan budaya demokrasi.

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

No.	Dokumen primer dan tahun arsip/edisi	Jenis dan asal teks	Relevansi analitis
6	Wahid (2006), "Islamku, Islam Anda, Islam Kita"	Tulisan dalam buku "Islamku, Islam Anda, Islam Kita" (The Wahid Institute); teks diterbitkan ulang oleh NU Online pada 2015.	Memberi bahan refleksi mengenai perubahan pemikiran, kemajemukan tafsir, dan penolakan terhadap pemaksaan.

Sumber dimasukkan ke dalam korpus apabila memenuhi empat ketentuan: (a) halaman sumber mencantumkan Abdurrahman Wahid sebagai penulis; (b) teks lengkap atau isi argumentasinya dapat diperiksa secara langsung; (c) pembahasannya relevan dengan pertanyaan penelitian; dan (d) tahun atau edisi penerbitannya dapat dikenali. Bahan sekunder, ringkasan yang tidak menghadirkan argumentasi secara utuh, serta tulisan tentang Gus Dur yang atribusi atau asal-usulnya tidak dapat dipastikan dikeluarkan dari data primer. Oleh karena itu, enam teks tersebut diperlakukan sebagai sampel yang dipilih secara purposif, bukan sebagai representasi lengkap seluruh karya Gus Dur.

Kritik sumber dan prosedur analisis

Kritik eksternal dilakukan dengan menelusuri identitas situs atau penerbit, nama penulis, judul, keterangan tahun, serta status dokumen sebagai arsip atau publikasi ulang. Selanjutnya, kritik internal diarahkan pada persoalan yang sedang ditanggapi, sasaran pembaca atau lawan argumentasi, penggunaan istilah penting, posisi penulis, dan kemungkinan adanya corak polemis dalam artikel opini. Versi digital tidak selalu mencantumkan nomor halaman atau informasi lengkap tentang publikasi awal. Karena itu, kutipan langsung dirujuk berdasarkan tahun dan nomor paragraf laman apabila informasi tersebut tersedia; nomor halaman yang tidak terverifikasi tidak ditambahkan. Tanggal yang ditampilkan arsip digunakan sebagai petunjuk bibliografis, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk memastikan waktu terbit pertama.

Proses analisis dilaksanakan dalam lima tahap. Tahap pertama adalah membaca keenam teks secara menyeluruh guna memahami susunan argumen dan konteksnya. Tahap kedua memberi kode awal pada bagian yang membahas hukum dan hak warga, hubungan agama–negara, solidaritas, pluralitas, pemaksaan penafsiran, serta pembentukan masyarakat. Pada tahap ketiga, kode-kode yang berdekatan dikelompokkan ke dalam tema naratif. Tahap keempat membandingkan tema antardokumen dengan tetap memperhatikan jenis tulisan dan tujuan komunikasinya. Tahap terakhir menyusun interpretasi serta memeriksa dukungan bukti tekstual dan hubungannya dengan penelitian sebelumnya. Tabel korpus beserta contoh pengodean disajikan sebagai audit trail agar dasar penarikan interpretasi dapat ditelusuri pembaca.

Tabel 3. Contoh Pengodean, Tema Analitis, dan Interpretasi Data Teks

Cuplikan/data tekstual	Kode awal	Tema analitis	Interpretasi yang dibatasi oleh data
"Islam adalah agama yang demokratis" (Wahid, 1997a, para. 1).	Menautkan Islam dengan prinsip demokrasi.	Legitimasi etis demokrasi melalui penalaran keagamaan.	Dokumen menunjukkan upaya menghubungkan kedua gagasan, tetapi tidak mewakili seluruh posisi umat Islam.
Solidaritas disebut membentuk bangunan sosial yang "dapat mengayomi manusia" (Wahid, 1997b, para. 1).	Solidaritas dipahami sebagai jaminan saling melindungi.	Komunitas sebagai ruang dukungan dan perlindungan sosial.	Masyarakat sipil ditelaah sebagai hubungan sosial, bukan sebatas organisasi yang terdaftar.
Gus Dur menulis bahwa tugasnya ingin "mendekatkan antara kaum Kristen dan muslimin" (Wahid, 1998a, para. 4).	Penekanan pada hubungan dan kerja sama lintas agama.	Demokratisasi sebagai proses membangun relasi antarwarga.	Dialog dipahami sebagai tindakan bersama yang melampaui sikap toleran secara pasif.
Demokrasi harus melindungi "hak-hak pihak minoritas" (Wahid, 2003, para. 1).	Jaminan hak bagi kelompok minoritas.	Demokrasi yang mencakup hak substantif warga.	Makna demokrasi dalam teks melampaui pelaksanaan pemilu.
Pemaksaan tafsir dinyatakan "bertentangan dengan demokrasi" (Wahid, 2006, para. 16).	Penolakan terhadap monopoli atau pemaksaan penafsiran.	Ragam tafsir dan pembatasan otoritas pemakna.	Dokumen 2006 menonjolkan kemajemukan penafsiran, tetapi tidak membuktikan pola perubahan yang linear.

Dalam penelitian ini, triangulasi dipahami sebagai pembandingan isi sumber dengan konteks dan kajian terdahulu. Tema yang ditemukan pada dokumen primer diperiksa melalui perbandingan dengan hasil penelitian (Barton, 2002; Salim, 2011; Setiawan, 2017; Syabibi et al., 2021). Referensi sekunder itu berfungsi sebagai pembanding, bukan menggantikan bukti primer. Karena penelitian tidak melibatkan pengode independen dan tidak menghitung frekuensi tema secara kuantitatif, hasil analisis disampaikan sebagai interpretasi kualitatif dengan cakupan sumber yang dinyatakan secara terbuka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Arsip sebagai jejak pemikiran dan sebagai hasil kurasi

Enam dokumen yang diteliti memiliki bentuk dan konteks yang beragam. Korpus ini memuat artikel opini tentang persoalan politik dan agama dari akhir dekade 1990-an, tulisan yang merumuskan prinsip demokrasi pada 2003, serta esai reflektif yang terbit dalam buku pada 2006. Variasi genre dan latar penerbitan itu berpengaruh terhadap penyajian argumentasi. Artikel opini biasanya merespons perdebatan publik

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

yang berlangsung pada masa penulisannya, sementara "Islamku, Islam Anda, Islam Kita" berisi peninjauan kembali pengalaman intelektual penulis dalam memahami Islam (Wahid, 2006). Maka, perbedaan tekanan antarteks tidak serta-merta menandakan pertentangan ideologi atau perubahan pemikiran secara bertahap; perbedaan itu juga bisa dipengaruhi tema, sasaran pembaca, dan keadaan ketika tulisan dibuat.

Selain menyimpan teks, arsip digital bertindak sebagai perantara yang memengaruhi akses dan cara dokumen ditampilkan. GusDur.Net mengategorikan tulisan dan mencantumkan metadata tahun, sedangkan NU Online menerbitkan ulang bagian dari buku tahun 2006. Penyajian digital tersebut membantu pembaca menemukan sumber, tetapi juga ikut menentukan dokumen yang tampak, tampilan judul, serta konteks pembacaan ulangnya. Kajian memori menekankan bahwa pemilihan dan pemanfaatan kembali jejak masa lalu berperan dalam pembentukan ingatan sosial (Halbwachs, 1992; Olick & Robbins, 1998). Kendati demikian, data penelitian ini hanya menunjukkan memori intelektual yang diperantarai arsip. Keenam teks tersebut tidak memadai untuk menjelaskan bagaimana semua kelompok masyarakat mengenang atau menafsirkan Gus Dur setelah wafatnya.

2. 1997–1998: demokrasi, solidaritas, dan hubungan agama–negara

Dalam tulisan "Demokrasi, Keadilan dan Keterwakilan", demokrasi dijelaskan melalui prinsip hukum dan musyawarah, sehingga cakupannya tidak terbatas pada prosedur pemilihan umum. Pernyataan "Islam adalah agama yang demokratis" dipakai untuk mengaitkan tradisi Islam dengan nilai demokrasi, sementara pembahasan mengenai hukum dan keterwakilan menjelaskan aspek prosedural dari argumen tersebut (Wahid, 1997a). Di dalam kerangka itu, identitas Gus Dur sebagai ulama tidak digambarkan sebagai penghalang keterlibatan politik. Sebaliknya, nilai keagamaan ditempatkan sebagai salah satu landasan etis bagi penegakan hukum dan pengaturan kehidupan bersama.

Dimensi solidaritas terlihat lebih jelas dalam esai "Membentuk Solidaritas Sosial". Di dalamnya, Gus Dur menghubungkan solidaritas dengan upaya membangun tatanan sosial yang dapat "mengayomi manusia" (Wahid, 1997b). Gagasan tersebut menggeser perhatian dari masyarakat sipil yang hanya dipahami sebagai organisasi atau kelompok penekan menuju mutu hubungan sosial yang menopang kehidupan kolektif. Akan tetapi, penekanan ini sebaiknya dipahami sebagai salah satu pola narasi dalam teks, bukan sebagai definisi tunggal masyarakat sipil yang otomatis berlaku bagi semua tulisan Gus Dur. Hal ini beririsan dengan temuan (Salim, 2011), yang memperlihatkan keragaman bentuk dan orientasi masyarakat sipil Muslim Indonesia berdasarkan cara aktor keagamaan memaknai hubungannya dengan negara.

Melalui "Agama dan Demokratisasi", Gus Dur mengkritik respons yang memperbesar rasa takut antarpemeluk agama. Ia menggambarkan perannya sebagai usaha untuk "mendekatkan antara kaum Kristen dan muslimin di negeri kita ini" (Wahid, 1998a). Demokratisasi, dalam argumen tersebut, berkaitan dengan pembangunan hubungan antarwarga dan bukan hanya pembaruan lembaga politik. Gagasan senada muncul dalam "Hindari Negara Berasumsi Agama", yang mengingatkan bahwa rumusan relasi agama dan negara yang tampak seimbang di tingkat teori belum tentu menjamin keadilan dalam pelaksanaannya (Wahid, 1998b). Kedua tulisan itu menunjukkan bahwa penggunaan

bahasa agama tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang terbuka bagi semua pihak; dampak politik dan sosialnya tetap perlu dinilai.

Pembacaan ini berdekatan dengan analisis (Hefner, 2000), yang menempatkan demokratisasi Indonesia dalam hubungan yang saling memengaruhi antara Islam, organisasi sosial, dan lembaga politik. Namun demikian, tulisan Gus Dur tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh organisasi Islam mempunyai pandangan serupa. (Salim, 2011) justru menunjukkan adanya persaingan dan perbedaan dalam representasi masyarakat sipil Muslim. Menggabungkan kedua sudut pandang tersebut membantu menegaskan bahwa tradisi Islam Indonesia tidak tepat diperlakukan sebagai kelompok pemikiran yang sepenuhnya tunggal.

3. 2003: perlindungan hak warga dan batas demokrasi prosedural

Dalam esai "Demokrasi dan Demokratisasi Indonesia", Gus Dur menguraikan demokrasi melalui sejumlah prinsip, antara lain supremasi hukum, kesetaraan warga di depan undang-undang, kebebasan berpikir dan berpendapat, penghargaan atas perbedaan pandangan, serta jaminan bagi kelompok minoritas (Wahid, 2003). Penegasan tentang perlunya melindungi "hak-hak pihak minoritas" dalam kehidupan bernegara menjadi salah satu bukti penting dari orientasi tersebut (Wahid, 2003). Dengan demikian, demokrasi tidak diletakkan semata-mata pada hasil penghitungan suara. Tolok ukurnya juga mencakup pembatasan dominasi mayoritas dan adanya ruang aman bagi warga untuk mengemukakan pandangan.

Tulisan yang sama membedakan tersedianya lembaga demokrasi dari terbentuknya kebudayaan demokratis. Menurut Gus Dur, keberadaan institusi negara saja belum cukup untuk menumbuhkan praktik demokrasi di masyarakat (Wahid, 2003). Artinya, demokrasi berkaitan dengan dua ranah yang saling mendukung: desain kelembagaan dan kebiasaan sosial-politik. Dalam korpus ini, negara tetap diperlukan untuk menjamin hukum, tetapi warga dan organisasi sosial juga berperan menjaga kebebasan serta mengawasi penggunaan kekuasaan. Interpretasi tersebut sejalan dengan perhatian (Salim, 2011) terhadap dinamika hubungan negara dan masyarakat, tanpa mereduksi seluruh tindakan politik Gus Dur menjadi satu bentuk masyarakat sipil.

Jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan dari akhir 1990-an, artikel tahun 2003 menyajikan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih terstruktur serta membedakan keberadaan lembaga dengan budaya yang menopangnya. Hal ini menunjukkan perbedaan cara penekanan dalam dokumen yang dianalisis. Namun, karena sampel tidak mencakup semua karya Gus Dur pada setiap tahun, temuan tersebut hanya berlaku bagi korpus penelitian. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh pemikiran Gus Dur berkembang melalui tahapan yang linear.

4. 2006: refleksi diri, pluralitas tafsir, dan penolakan pemaksaan

Esai "Islamku, Islam Anda, Islam Kita" menghadirkan sisi lain dalam korpus karena pembahasannya tidak hanya menyentuh institusi dan kebijakan, tetapi juga mencakup refleksi Gus Dur atas perubahan pemikirannya. Pada bagian awal, ia menyebut bahwa pembacaan kembali terhadap makalah-makalah lama membuatnya menyadari adanya perubahan besar dalam cara pandangnya tentang Islam (Wahid, 2006). Pernyataan retrospektif ini penting untuk analisis sejarah pemikiran:

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

gagasan Gus Dur tidak tepat diperlakukan sebagai seperangkat pandangan yang sejak awal sepenuhnya tetap, terlebih ketika penulisnya sendiri mengakui adanya perubahan.

Istilah "Islamku", "Islam Anda", dan "Islam Kita" membedakan pengalaman beragama secara pribadi, keyakinan atau tradisi yang dianut pihak lain, dan ranah kepentingan bersama yang membutuhkan pertimbangan publik. Meski demikian, pembagian tersebut tidak menghapus potensi konflik. Gus Dur mengingatkan bahwa "Islam Kita" bisa dijadikan tafsir yang dipaksakan oleh pihak yang merasa paling berwenang, dan tindakan memaksakan tafsir itu disebut "bertentangan dengan demokrasi" (Wahid, 2006). Oleh karena itu, pluralisme bukan sekadar sikap menerima perbedaan. Konsep ini juga menyangkut pembatasan kuasa individu atau kelompok agar penafsirannya tidak dipaksakan sebagai ketentuan yang harus diterima semua orang.

Interpretasi ini sebagian sejalan dengan (Setiawan, 2017), yang menempatkan pluralisme sebagai unsur penting dalam pemikiran Gus Dur, serta (Syabibi et al., 2021), yang membahas dialog dan komunikasi kultural. Sumbangan artikel ini terletak pada perhatian terhadap susunan narasi dan refleksi diri yang tampak di dalam dokumen. Pluralisme di sini tidak dipahami sebagai label yang menghapus seluruh ketegangan; teks tahun 2006 justru mengungkap kemungkinan pemaksaan yang dilakukan atas nama kepentingan bersama. Karena itu, citra Gus Dur sebagai pembela pluralisme didukung oleh teks-teks dalam sampel ini, tetapi temuan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa seluruh tulisan, tindakan politik, maupun penafsiran publik terhadap dirinya selalu konsisten tanpa pertentangan.

5. Sintesis lintas periode: kesinambungan tema dan pergeseran penekanan

Tabel 4. Sintesis Pemikiran Lintas Periode dan Temuan Analitis Korpus Dokumen

Dimensi	Teks 1997–1998	Teks 2003	Teks 2006	Sintesis yang ditopang korpus
Demokrasi	Demokrasi dikaitkan dengan kepastian hukum, representasi, solidaritas, dan kerja sama antaragama.	Prinsipnya dijabarkan melalui persamaan hukum, kebebasan, penerimaan atas perbedaan, dan perlindungan minoritas.	Tekanannya berada pada penolakan pemaksaan tafsir dan perumusan kepentingan bersama tanpa paksaan.	Prinsip kebebasan dan kehidupan bersama berlanjut; konteks dan gaya penyampaian argumen berbeda antarteks.
Agama dan negara	Mengkritik ketegangan antaragama dan kecenderungan mengasumsikan atau memformalkan agama dalam negara.	Negara ditempatkan sebagai penjamin kesetaraan hukum dan hak warga.	Pengalaman beragama dibedakan dari pencarian kepentingan bersama yang dapat disepakati tanpa paksaan.	Agama menjadi sumber etika dan identitas, sedangkan klaim politik perlu dinilai dari pengaruhnya terhadap hak warga.

Dimensi	Teks 1997–1998	Teks 2003	Teks 2006	Sintesis yang ditopang korpus
Masyarakat sipil	Solidaritas dan kedekatan antarwarga menjadi penekanan utama.	Peran warga, kebebasan, dan budaya demokrasi dibahas di luar keberadaan lembaga formal.	Penerimaan atas keberagaman tafsir dipasangkan dengan kritik terhadap dominasi makna.	Masyarakat sipil dipahami sebagai institusi sekaligus etika sosial dan ruang untuk mengelola perbedaan.
Memori intelektual	Tulisan arsip menghubungkan gagasan dengan persoalan publik pada konteks kemunculannya.	Tulisan tahun 2003 menyampaikan prinsip demokrasi dalam susunan yang lebih terperinci.	Refleksi retrospektif mengakui adanya perubahan cara pandang.	Memori intelektual terbentuk melalui teks, konteks produksi, metadata dan kurasi arsip, serta pembacaan ulang; data tidak menunjukkan alur perubahan yang pasti.

Perbandingan dokumen menghasilkan tiga simpulan analitis yang perlu dibatasi pada korpus ini. Pertama, terdapat kesinambungan perhatian pada kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan kelompok minoritas, dan penolakan terhadap pemaksaan pandangan. Kedua, masyarakat sipil dapat dipahami melalui dua dimensi yang saling terhubung: institusi yang membatasi pemusatan kekuasaan serta etika sosial yang memungkinkan warga hidup berdampingan dalam perbedaan. Ketiga, memori intelektual tidak cukup dipahami sebagai kumpulan gagasan seorang tokoh yang dianggap penting setelah ia meninggal. Memori itu juga terbentuk melalui proses pemilihan teks, pengorganisasian arsip, dan penafsiran ulang pada masa berikutnya. Gagasan ketiga merupakan usulan konseptual artikel ini, namun perlu diuji lebih jauh melalui penelitian terhadap proses kurasi arsip, media, pidato peringatan, biografi, dan tanggapan publik yang kritis agar pembentukan memori setelah wafat dapat diterangkan secara lebih menyeluruh.

6. Batas interpretasi dan ruang kontestasi

Interpretasi hasil penelitian ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, enam teks yang dipilih tidak mencakup seluruh tulisan, pidato, kebijakan, atau aktivitas politik Gus Dur. Kedua, dua situs yang menjadi sumber arsip memiliki cara penyuntingan dan latar penerbitan yang berbeda; akibatnya, dokumen digital tidak dapat dianggap sebagai representasi netral dari semua pemikiran yang pernah diproduksi. Ketiga, karena sumber primer terutama berisi tulisan Gus Dur sendiri, penelitian ini belum menelaah secara langsung narasi tandingan, kritik, atau gambaran alternatif tentang dirinya. Kajian (Salim, 2011) mengenai pertarungan representasi masyarakat sipil memberi konteks yang lebih luas, tetapi tidak menggantikan perlunya sumber yang secara khusus merekam penerimaan dan kritik terhadap Gus Dur.

Atas dasar keterbatasan tersebut, penelitian ini tidak menyatakan bahwa ingatan publik mengenai Gus Dur selalu seragam atau sepenuhnya dibangun di atas

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

citra inklusif. Klaim yang dapat ditopang oleh data lebih terbatas: enam sumber primer memperlihatkan narasi yang kuat mengenai demokrasi, pluralisme, perlindungan hak warga, dan solidaritas. Sementara itu, cara gagasan tersebut kemudian dipilih, diringkas, diperdebatkan, atau ditolak dalam ruang publik memerlukan bukti tambahan. Pembatasan kesimpulan ini penting agar cakupan pernyataan tetap sepadan dengan sumber yang benar-benar dianalisis.

SIMPULAN

Penelitian ini menelaah cara enam tulisan Gus Dur yang tersimpan dalam arsip periode 1997–2006 menggambarkan demokrasi, agama, solidaritas sosial, dan masyarakat sipil. Hasil analisis menunjukkan tiga kecenderungan: demokrasi bertumpu pada kesetaraan hukum, kebebasan, dan perlindungan kelompok minoritas; agama dapat memberi landasan etis tanpa harus dijadikan ideologi formal negara; serta solidaritas dan pengakuan atas perbedaan penafsiran mendukung kehidupan bersama. Perbandingan antarteks menemukan kesinambungan pada prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga variasi dalam penekanan. Tulisan akhir 1990-an lebih dekat dengan polemik publik dan hubungan antaragama, dokumen tahun 2003 menyusun prinsip demokrasi serta menyoroti keterbatasan lembaga, sedangkan refleksi 2006 membahas perubahan pandangan dan risiko pemaksaan tafsir. Karena korpus dipilih secara purposif dan tidak mewakili seluruh karya Gus Dur, pola ini tidak dapat dianggap sebagai bukti perkembangan pemikiran yang berlangsung secara linear.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan perlunya membedakan memori intelektual dari biografi pemikiran dan ingatan publik. Berdasarkan cakupan penelitian, istilah memori intelektual dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara tulisan yang dihasilkan seorang tokoh, proses seleksi dan penataan arsip, serta cara teks ditafsirkan kembali dalam konteks yang berbeda. Kontribusi metodologisnya ialah pentingnya menyertakan bukti tekstual dan konteks penerbitan, sekaligus menyatakan keterbatasan proses kurasi sebelum menarik kesimpulan lebih luas mengenai ingatan sosial.

Dari sisi pembelajaran, tulisan-tulisan Gus Dur yang dikaji dapat dijadikan sumber diskusi mengenai pendidikan kewargaan dan sejarah pemikiran Indonesia, terutama terkait demokrasi, kebebasan, pluralisme, dan tanggung jawab sosial. Pemanfaatannya perlu menempatkan teks dalam konteks sejarah dan membandingkan argumen antardokumen, bukan hanya menggunakan-nya sebagai simbol normatif. Riset berikutnya dapat memperluas sumber melalui arsip pidato, dokumen kebijakan, berita, biografi, narasi peringatan, serta kritik dari kelompok dengan posisi berbeda. Korpus yang lebih beragam akan membantu menjelaskan bagaimana gambaran tentang Gus Dur dibentuk, diperdebatkan, dan disebarkan kembali di ruang publik setelah wafatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Barton, Greg. (2002). *Abdurrahman Wahid, Muslim democrat, Indonesian president : a view from the inside*. UNSW Press.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Cohen, J. L. ., & Arato, Andrew. (1999). *Civil Society and Political Theory*. Mit Press.

Halbwachs, M. (1992). *On Collective Memory* (L. A. Coser, Ed.). University of Chicago Press.

Hefner, R. W. . (2000). *Civil Islam : Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.

Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. *Annual Review of Sociology*, *24*(1), 105–140. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.105

Riessman, C. Kohler. (2008). *Narrative methods for the human sciences*. SAGE Publications.

Salim, A. (2011). Between ICMI and NU: The Contested Representation of Muslim Civil Society in Indonesia, 1990-2001. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, *49*(2), 295–328. https://doi.org/10.14421/ajis.2011.492.295-328

Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur dalam Meretas Keberagaman di Indonesia. *Asketik*, *1*(1), 57–68. https://doi.org/10.30762/asketik.v1i1.1102

Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., & Sahil, A. (2021). Communicative Cultural Dakwah of Abdurrahman Wahid in Pluralistic Society. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, *29*(2), 1–33. https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220

Wahid, A. (1997a, April 1). Membentuk Solidaritas Sosial. *Harian Media Indonesia*.

Wahid, A. (1997b, April 25). Demokrasi, Keadilan dan Keterwakilan. *Harian Media Indonesia*.

Wahid, A. (1998a, October 21). Agama dan Demokratisasi. *Harian Duta Masyarakat*.

Wahid, A. (1998b, November 13). Hindari Negara Berasumsi Agama. *Harian Media Indonesia*.

Wahid, A. (2003, November 12). Demokrasi dan Demokratisasi Indonesia. *Harian Kedaulatan Rakyat*.

Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, masyarakat, negara, demokrasi* (R. Ahmad Suaedy, Gamal Ferdhi, & Agus Maftuh Abegebriel, Eds.; Vol. 1). The WAHID Institute.

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.